

Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterrens

Moh. Talabul Amal^{1*}, Ali Muhammad², Takdir Ali Mukti³

*Corresponding Author: talabulamal@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.21941

Abstract

This study aims to determine the background of Russia's intervention in Ukraine through the approach of the concept of deterrence. To reveal this, this study uses a qualitative-explanatory method aimed at presenting a depth of analysis with the context of testing the hypothesis and the relevance of two variables. The results of the study reveal that the background of Russia's intervention in Ukraine is to respond to threats from the expansion of NATO's membership wing in Eastern Europe, especially Ukraine. In addition, Russia is also driven by the existence of Russian national interests in the territory of Ukraine and the Crimean Peninsula to secure its influence in Ukraine and reject the influence of the United States in Eastern Europe. Russia's intervention in Ukraine is seen as an effort to prevent Ukraine from joining the European Union. Russia is considered not to respect Ukraine's sovereignty over the act of annexing the Crimean peninsula in 2014 and the military invasion of Ukraine in 2022. The limitation of this research is that the data used is still limited to the type of secondary data, namely journals containing data on Russia's intervention against Ukraine.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang intervensi Rusia terhadap Ukraina melalui pendekatan konsep *Deterrence*. Untuk mengungkapkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanatif yang ditujukan untuk menghadirkan kedalaman analisis dengan konteks pengujian hipotesis dan relevansi dua variabel. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang Rusia mengintervensi Ukraina adalah untuk merespon ancaman dari tindakan perluasan sayap keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur khususnya Ukraina. Selain itu, Rusia juga didorong oleh adanya kepentingan nasional Rusia di wilayah Ukraina dan Semenanjung Krimea untuk mengamankan pengaruhnya di Ukraina dan menolak pengaruh Amerika Serikat di wilayah Eropa Timur. Tindakan Rusia mengintervensi Ukraina dianggap sebagai upaya pencegahan bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa. Rusia dinilai tidak menghormati kedaulatan Ukraina atas tindakan aneksasi wilayah semenanjung Krimea tahun 2014 dan Invasi militer di Ukraina tahun 2022. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan masih terbatas pada jenis data sekunder yaitu jurnal-jurnal yang berisikan data-data intervensi Rusia terhadap Ukraina.

Keywords

*Rusia, Ukraina, NATO,
Intervensi, Deterrence*

Article History

Received July, 25

Revised November, 23

Accepted December, 28

Published December, 30

Corresponding Author

Moh. Talabul Amal.
Jl. Brawijaya, Geblagan,
Tamantirto, Kec. Kasihan,
Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
55183.

Pendahuluan

Terpilihnya Volodymyr Zelensky sebagai Presiden Ukraina disambut baik oleh negara-negara Barat yang tergabung dalam faksi NATO dan anggota Uni Eropa, hal ini semakin meningkatkan ketegangan dari pihak Rusia yang menyadari bahwa posisinya akan tidak diuntungkan (BURNS, 2022). Posisi Rusia yang berseberangan dengan NATO dalam beberapa periode terakhir ini menjadi isu keamanan dan geopolitik yang sangat kompleks. Kompleksitas di sektor keamanan, ekonomi hingga politik yang tercermin dari perilaku Rusia dan hubungan Ukraina bersama Uni Eropa dan NATO merupakan kondisi yang mendeskripsikan adanya dilema

keamanan. Dilema keamanan dapat didefinisikan sebagai aksi reaksi antar beberapa negara yang memperlihatkan perilaku dengan kecenderungan peningkatan aktivitas militer secara mandiri atau aliansi dengan tujuan melemahkan keamanan negara lain (Jervis, 1994).

Dengan demikian, dilema keamanan kerap kali disebut sebagai pra-syarat terciptanya tindakan penggentaran dari suatu negara atau dalam istilah teoritisnya disebut *deterrence*. *Deterrence* atau penggentaran merupakan tindakan yang terlihat pada aksi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina melalui intervensi militer, hal ini kemudian menghadirkan suatu pandangan terkait urgensi Rusia dalam melakukan serangan kepada Ukraina sehingga membawa penulis pada pertanyaan “Mengapa Pemerintah Rusia melakukan intervensi militer dan politik terhadap Pemerintahan Ukraina?”. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penulis membagi tulisan ini ke dalam tiga bab yang berkorelasi dan memiliki relevansi dengan premis yang telah disampaikan penulis sebelumnya. Adapun bab pertama akan membahas mengenai awal mula ketegangan Rusia dan Ukraina, kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas instabilitas dan arah politik luar negeri yang dimiliki oleh Ukraina, selanjutnya akan dihadirkan pula pembahasan terkait intervensi yang dilakukan Rusia sebagai konsekuensi dari posisi Ukraina dan kondisi politik-pemerintahan domestiknya. Terakhir, penulis menghadirkan analisis terkait faktor yang menjadi penyebab intervensi yang dilakukan Pemerintah Rusia dengan perspektif *deterrence*.

Untuk menghadirkan analisis terkait intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, penelitian ini akan menggunakan konsep *deterrence*. Konsep *deterrence* merupakan pandangan yang melihat negara sebagai aktor yang memiliki kekhawatiran atas ancaman yang menimpa dirinya, sehingga berupaya melakukan tindakan untuk mengatasi pihak yang menghadirkan ancaman tersebut. Menurut Huth (1999) dalam tulisannya yang bertajuk “*Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates*”, konsep *deterrence* mengacu pada upaya suatu pihak menggunakan strategi ancaman untuk menekan atau menghambat tindakan pihak lain dalam rangka melakukan suatu tindakan. *Deterrence* merupakan opsi strategis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menekan tindakan suatu pihak yang disinyalir dapat mendatangkan kerugian dan ancaman terhadap pihak tersebut. Dalam konteks hubungan antar negara (studi hubungan internasional), *deterrence* dipandang sebagai opsi tindakan yang diinterpretasikan melalui bentuk kebijakan politik luar negeri untuk mencegah pengaruh dan tindakan negara lain yang dianggap dapat menimbulkan ancaman.

Huth (1999) menyatakan bahwa interpretasi *deterrence* melalui kebijakan memiliki dua bentuk yakni kebijakan militer dan non-militer yang dimana ditujukan untuk menghambat dan menghentikan ancaman militer dan non-militer dari negara lain pula. Fakta terkait Rusia yang menggunakan kapasitas militernya dengan melakukan intervensi terhadap Ukraina telah menjawab prasyarat konsep *deterrence* yang dimana suatu pihak menerapkan kebijakan pencegahan dengan menggunakan kapasitas militernya dalam rangka menekan ancaman dari pihak lain, dalam kasus ini Ukraina merupakan pihak yang diindikasikan menghadirkan ancaman terhadap Rusia. Konseptualisasi *deterrence* dalam tulisan ini selanjutnya akan ditujukan untuk menghadirkan analisis mendalam terkait faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kekhawatiran Rusia yang melihat Ukraina sebagai pihak yang mendatangkan ancaman.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan intervensi Rusia terhadap Ukraina. Melalui analisa dari berbagai penelitian tersebut, Rusia memulai invasinya pada Ukraina karena adanya kedekatan dan hubungan dari Ukraina dengan NATO yang tentunya memicu

respon yang tidak baik dari Russia dan Vladimir Putin dengan melihat kembali situasi masa perang dingin (Hanappi 2022). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dari (ORHAN 2022) menyebutkan bahwa latar belakang dari invasi Rusia terhadap Ukraina tidak hanya akibat dari kedekatan presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun juga karena Russia yang berusaha untuk melindungi masyarakat pendukung Russia di Donbas yang mengalami banyak kesengsaraan dari rezim Kyiv, tentu saja perseteruan ini juga berdampak besar pada perekonomian dan perdagangan global. Senada dengan kedua penelitian tersebut, (Hensman 2022). Juga menambahkan latar belakang intervensi yang terjadi antara kedua negara tersebut terjadi karena unsur historis didalamnya dimana perseteruan antara kedua negara tersebut memang sudah banyak terjadi sehingga memicu sebuah invasi yang tidak terhindarkan.

Intervensi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina tentu saja memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang. Seperti perekonomian, sosial sampai dengan kesehatan. Ditambah lagi, salah satu konsekuensi yang terbesar disamping perekonomian adalah kesehatan publik yang semakin memburuk pada banyak warga sipil maupun personel yang terdampak dari peperangan tersebut (Leon, dkk 2022). Lebih luas dari hal tersebut, dari latar belakang antara kedua negara ini, dampak yang lebih luas ternyata memiliki dampak heterogen pada pasar ekuitas global yang meluas pada sektor ekonomi dan energi di seluruh dunia khususnya di eropa (Boubaker 2022).

Metode

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa adanya campur tangan dari peneliti sehingga data dan fakta yang dihadirkan bersifat objektif. Penelitian kualitatif akan menghasilkan hasil akhir penelitian berbentuk deskripsi kata-kata dan narasi bukan berbentuk angka dan eksplanasi statistik (Sugiyono, 2019). Dalam mencari faktor dibalik intervensi Rusia di Ukraina, penelitian ini menggunakan metode eksplanatif yaitu metode yang ditujukan untuk mencari kedalaman suatu fenomena dengan konteks pengujian hipotesis.

Sebagaimana menurut Sugiyono (2019), metode penelitian eksplanatif adalah jenis metode yang ditujukan untuk menghadirkan pembahasan dan analisis terkait suatu fenomena yang memiliki dua variabel. Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah tindakan Rusia yang melakukan intervensi dan kondisi politik-pemerintahan Ukraina. Kedua variabel tersebut kemudian akan dicari relevansinya dengan bantuan premis-premis dari konsep *deterrence*. Penggunaan metode eksplanatif dalam penelitian ini juga akan ditujukan untuk menghadirkan suatu hasil akhir pengujian hipotesis, sehingga dalam hal ini peneliti harus menetapkan hipotesis di awal penelitian (Sugiyono, 2013).

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini juga akan didukung dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam proses penelitian yang difokuskan pada pencarian literatur-literatur. Menurut Nazir (2013), teknik studi pustaka merupakan upaya pengumpulan data dalam penelitian dengan berpaku pada telaah berbagai bacaan seperti buku, catatan dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti. Penggunaan teknik studi pustaka ditujukan untuk memperoleh dasar dan pandangan untuk merumuskan dan membangun argumentasi penelitian. Dengan menggunakan teknik studi pustaka maka data yang diperoleh yakni data sekunder.

Menurut Supomo (2013), data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara tidak langsung dalam proses penelitian, dalam artinya data sekunder diperoleh dari sumber perantara seperti catatan dan buku-buku tertulis yang melalui proses penelitian pula sebagaimana sasaran pengumpulan data dari teknik studi pustaka.

Penelitian ini mencari literatur dan bacaan-bacaan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena pilihan peneliti yakni intervensi Rusia terhadap Ukraina. Desain penelitian kualitatif-eksplanatif akan ditujukan untuk menghadirkan kedalaman analisis dan pembahasan yang berorientasi pada pembahasan terkait faktor yang mendorong terciptanya konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina yang memakan banyak korban sipil.

Hasil dan Pembahasan

Catatan Historis Ketegangan dan Konflik Antara Rusia dan Ukraina

Ukraina merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan kompleks terkait stabilitas politik dan pemerintahan di kawasan Eropa. Hal tersebut merupakan konsekuensi geografis Ukraina notabene yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Rusia, Polandia, Slovakia dan Hongaria sehingga banyak para ahli memosisikan Ukraina negara penyangga di antara dua pihak yang bermusuhan atau *buffer state*. Indikasi ini semakin diperkuat dengan hadirnya pandangan bahwa Ukraina terletak dalam arena kompetisi yang terbentuk dari persaingan Rusia dan Uni Eropa pada sektor ekonomi dan politik (Nag, 2017). Dengan kondisi demikian, Ukraina menjadi pihak yang selalu menerima imbas dari persaingan dan selalu menjadi sasaran Rusia dalam agresivitas kebijakan politik bahkan hingga militer. Fakta ini membawa pada suatu kondisi yang mencerminkan kondisi bahwa Ukraina seringkali terlibat ketegangan dan konflik dengan Rusia.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina secara historis bermula ketika terjadi disintegrasi internal pada masyarakat Ukraina. Sejak masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych, masyarakat Ukraina terpecah menjadi dua kubu yakni kubu pro terhadap Pemerintahan Rusia dan kubu kontra yang lebih memihak pada Uni Eropa. Hal ini disebabkan putusan Presiden Viktor Yanukovych yang lebih memihak pada Pemerintah Rusia kala itu (BBC O. , 2013). Konflik politik yang terjadi di Ukraina semakin pelik dan mengalami turbulensi ke arah konflik identitas yang mengakibatkan terpecahnya masyarakat di Ukraina Barat dan Ukraina Timur. Secara demografis, 77.6 persen masyarakat Ukraina beretnis Slavia Timur dan 17.3 persen adalah etnis Rusia. Persebaran masyarakat Ukraina tersebut juga diikuti dengan penggunaan bahasa sehingga masyarakat Ukraina beretnis Rusia yang notabene lebih sedikit disinyalir menjadi sasaran diskriminasi dan marjinalisasi di wilayah Ukraina. Fakta antropologis tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai aksi masyarakat etnis Rusia yang menuntut diri untuk kembali kepada Pemerintah Rusia (Petro, 2014).

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin menuju ke arah yang lebih buruk pasca ditandatanganinya *Minsk Accord* pada tahun 2014-2015 yang berisi tentang tata cara pemilu di wilayah Luhansk dan Donetsk serta rencana menjadikan dua wilayah tersebut menjadi satu. Perjanjian tersebut dimaknai berbeda oleh kedua negara, menurut Ukraina perjanjian tersebut akan memberikan status khusus untuk kedua wilayah dan akan dipersatukan kembali dengan Ukraina, sedangkan menurut Rusia wilayah Luhansk dan Donetsk merupakan wilayah yang berada di bawah pengaruh Rusia (Iswara, 2022).

Menurut Presiden Perancis, Emmanuel Macron, *Minsk Accord* dapat menjadi sarana damai antara kedua negara yang tengah berkonflik, hal tersebut diketahui dari hasil pembicaraan kedua negara yang mengindikasikan kesepahaman dan satu kesepakatan terhadap *Minsk Accord* dengan proses negosiasi yang lebih detail. Namun, di sisi lain Presiden Komisi Uni Eropa menuduh bahwa Putin telah melakukan kejahatan dengan melanggar secara terang-terangan perjanjian internasional (Leyen, 2022), sehingga perjanjian ini tidak membawa signifikansi berarti bagi kedua negara.

Instabilitas dan Orientasi Politik Luar Negeri Ukraina

Terjadinya perpecahan masyarakat Ukraina merupakan peristiwa yang terjadi akibat keputusan Presiden Viktor Yanukovich yang membatalkan kerja sama dengan Uni Eropa. Kerjasama tersebut tercantum dalam kontrak *European Association Agreement* yang berisi perjanjian kerjasama ekonomi dan politik Uni Eropa-Ukraina. Pembatalan kerja sama dengan Uni Eropa pada akhirnya memecah kubu masyarakat Ukraina, terdapat kubu kontra yang menentang dan memicu aksi demonstrasi dan kubu pro yang berpihak pada putusan Presiden Viktor Yanukovich.

Penolakan terhadap *European Association Agreement* oleh Presiden Victor Yanukovich disebut sebagai bentuk ketidakindependenan dari Pemerintahan Ukraina sebab putusan yang dikeluarkan tersebut dinilai memihak Pemerintahan Rusia dan sebagai bentuk loyalitas terhadap etnis Rusia (EEAS, 2016). Reaksi mayoritas rakyat Ukraina yang kontra dengan kebijakan tersebut berpendapat bahwa Ukraina seharusnya terbebas dari bayang – bayang pengaruh Rusia dan mengakui dirinya sebagai penduduk dari Eropa Barat. Protes keras dari rakyat Ukraina merupakan puncak dari perbedaan antara dua kubu di Ukraina. Letak geokultur disisi timur yang berbatasan dengan Rusia membuat penduduk di daerah tersebut memihak Rusia dan berbanding terbalik dengan masyarakat yang di ada ibukota Kiev, Ukraina.

Kubu kontra yang menentang putusan tersebut pada akhirnya menggelar demonstrasi pada November 2013 dengan tujuan mendesak Presiden Viktor Yanukovich berhenti dari jabatannya beserta pemerintahannya yang memihak sisi Rusia (BBC O. , 2013). Akan tetapi, kekerasan antara polisi dan aparat keamanan lainnya terhadap demonstran menyebabkan aksi demonstrasi tersebut terhambat dan menyebabkan 77 demonstran meninggal dunia sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang lebih dalam (Traynor, 2014). Demonstrasi besar di Ukraina ini kemudian mendorong Ukraina untuk segera memilih Presiden pengganti dari Yanukovich yaitu Oleksandr Turchynov sebagai presiden pengganti hingga pemilihan ulang presiden kembali digelar, peristiwa ini lebih dikenal revolusi oranye (Kurkov, 2014).

Di sisi lain, kubu pro yang memihak pada putusan Presiden Viktor Yanukovich yakni warga-warga yang bermukim di Krimea melakukan aksi bersebrangan dengan menandatangani referendum dengan menyatakan memilih bergabung dengan Rusia (RT, 2014). Terciptanya momentum referendum yang membawa warga Krimea berpihak ke Rusia disebabkan oleh adanya penawaran pinjaman yang lebih menguntungkan yakni Rusia memberikan penawaran yang lebih besar dengan syarat Ukraina harus menolak kerja sama dengan Uni Eropa dan IMF dan bergabung dengan *Custom Union* yang merupakan serikat kerjasama perdagangan bersama dengan Belarusia dan Kazakhstan. (Balmforth, 2013). Sementara di sisi lainnya, Uni Eropa dan IMF juga menawarkan pinjaman untuk Ukraina dengan beberapa persyaratan sistem hukum dan regulasi yang cenderung menyulitkan masyarakat Ukraina terutama warga Krimea (Barker, 2013).

Pemerintahan Ukraina tidak lepas dari pihak – pihak berkuasa. Parlemen yang berfungsi sebagai dewan legislatif lebih condong pada kepentingan Uni Eropa dan Amerika. Sedangkan lembaga eksekutif yang dipimpin Yanukovych cenderung condong pada Rusia. Secara tidak langsung, konflik internal yang terjadi dalam pemerintahan Ukraina merupakan praktis intervensi yang dilakukan oleh Rusia sebagai negara *powerful* dan merupakan bentuk dari *proxy war* atau konflik oleh negara-negara berkuasa dan tidak terlibat secara langsung dalam wilayah konflik tersebut.

Stabilitas politik dan kondisi masyarakat di Ukraina semakin memburuk ketika terjadi kudeta Presiden Victor Yanukovych yang mengharuskannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sehingga membuat pemerintahan Ukraina kosong. Parlemen Ukraina kemudian menunjuk Oleksander Turchynov sebagai Presiden Ukraina sementara. Ukraina juga dihadapkan pada posisi tidak menguntungkan ditengah hutang luar negeri yang akan jatuh tempo. Tercatat bahwa Ukraina membutuhkan dana 35 miliar dollar untuk membayar obligasi luar negeri. Instabilitas politik dan kekacauan masyarakat sipil yang tersegmentasi menjadi dua kubu membuat perekonomian Ukraina bergejolak dan berada pada posisi berbahaya hingga dapat menyebabkan negara tersebut mengalami *default* atau bangkrut (Ramadhan, 2014).

Memanfaatkan kekacauan dalam pemerintahan dan masyarakat Ukraina, Rusia melakukan berbagai langkah politis salah satunya pada wilayah Krimea. Rusia memiliki kepentingan di Krimea mulai dari kepentingan sosial, politik, kultural, ekonomi dan keamanan. Alasan kepentingan Rusia di wilayah tersebut berasal dari ambisi rusia untuk menjadi pemain tunggal di kawasan tersebut, ikatan dengan negara pecahan Uni Soviet dan pencegahan pengaruh pihak Uni Eropa dan Amerika di wilayah tersebut merupakan faktor krusial yang menjadikan Krimea sebagai wilayah sasaran intervensi politik Rusia.

Intervensi Militer dan Politik Rusia Terhadap Ukraina

Berlanjut pada tahun 2019, Volodymyr Zelensky naik menjadi presiden Ukraina setelah mendapatkan suara mayoritas dan menggeser posisi Poroshenko di tubuh pemerintah Ukraina (News, 2019). Kemenangan Zelensky tersebut disambut baik dengan mendapat ucapan selamat dari negara – negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian melahirkan sentimen dari pihak Rusia yang menyatakan bahwa NATO yang dipimpin oleh Amerika tidak berhak untuk menawarkan keanggotaannya terhadap Ukraina, hal ini sesuai dengan jaminan hukum yang diterima oleh Rusia dari NATO berupa larangan pembangunan pangkalan militer dan sektor militer lainnya di wilayah sekitar Rusia (BURNS, 2022). Namun, negara-negara anggota NATO khususnya Amerika Serikat tidak mengindahkan hak Rusia dan justru menyuarakan narasi yang secara implisit menerima dan mengajak Ukraina bergabung dalam keanggotaan NATO (CNBC, 2022).

Tindakan negara-negara Barat disinyalir semakin mengancam posisi Rusia pada segi keamanan dan geopolitik, sehingga Pemerintah Rusia menyuarakan narasi yang memiliki indikasi mengancam kepada pihak Ukraina untuk tidak terlibat dalam keanggotaan NATO, Rusia juga meningkatkan aktivitas militernya di sekitar perbatasan Ukraina. Melihat hal ini, pada tanggal 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat Eropa Timur dengan kekuatan kapal dan jem tempur sebagai tanggapan atas penggunaan militer Rusia di perbatasan Ukraina. Kondisi ini menempatkan pihak Rusia dan Ukraina pada dilema keamanan (NDTV, 2022). Pejabat-pejabat diplomatik dievakuasi untuk meninggalkan Kiev sementara,

dengan alasan keamanan karena menganggap bahwa intervensi militer Rusia bisa terjadi kapan saja. Hal ini dianggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai upaya tidak menghormati keamanan Rusia ditengah kekhawatiran ekspansi dari NATO. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa Rusia tidak menginginkan perang dengan Ukraina dan akan melindungi kepentingannya dari Barat. Alih-alih meredakan ketegangan Amerika Serikat justru menanggapi pernyataan tersebut dengan mempertegas bahwa Zelensky harus waspada dan cemas terhadap kekuatan militer Rusia yang bisa kapan saja menginvasi (The Associated Press and Reuters, 2022).

Pada bulan Februari 2022, secara mengejutkan Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan serangan militer terhadap Ukraina kepada Ukraina. Peristiwa ini menimbulkan banyak keprihatinan dan kekhawatiran dunia internasional. Serangan militer ini juga banyak menimbulkan korban jiwa, kerusakan parah skala nasional di Ukraina yang menyebabkan jutaan warga mengungsi mencari perlindungan ke negara tetangga. Tindakan Rusia ini banyak menimbulkan kritik dan kecaman dari Uni Eropa dan Amerika. Bahkan, Majelis PBB juga mengesahkan resolusi yang mengkritik invasi dan menuntut penarikan penuh pasukan militer Rusia tetapi Rusia kemudian mem-*veto* resolusi tersebut (Adhi, 2022)

Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, penggunaan kekuatan Rusia dibenarkan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB tidak memiliki dukungan fakta atau hukum. Pasal 51 menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalam piagam ini akan merusak hak melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB. Secara khusus Rusia menyatakan intervensi terhadap ukraina tidak melawan hukum dan dapat menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan Donetsk dan Luhansk yang diakui Rusia sebagai negara merdeka (Jeff Neal, HLS, 2022). Namun, Ukraina tidak melakukan atau mengancam untuk melakukan serangan bersenjata terhadap Rusia atau negara anggota PBB lainnya. Bahkan jika Rusia dapat menunjukkan bahwa Ukraina telah melakukan atau berencana untuk melakukan serangan terhadap Rusia di wilayah Ukraina Donetsk dan Luhansk, Pasal 51 tidak akan mengizinkan tindakan dalam pembelaan diri kolektif, karena Donetsk dan Luhansk bukan negara anggota PBB (Bellinger, 2022). Hal tersebut membuktikan sesuai aturan hukum internasional yang berlaku bahwa invasi terhadap ukraina melanggar prinsip piagam PBB.

Putin membenarkan invasi ke Ukraina dengan menyatakan bahwa melindungi orang-orang berbahasa Rusia di wilayah Donbas dari genosida. Bahasa Putin mirip dengan “tanggung jawab untuk melindungi” (R2P), yang merupakan prinsip internasional yang diadopsi oleh KTT PBB pada tahun 2005 dan berusaha untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis. Di bawah prinsip ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduknya sendiri dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab melindungi ketika suatu negara secara nyata gagal melindungi populasinya (Torrens, 2022). Rusia menggunakan hak vetonya untuk membatasi tindakan DK PBB sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari, segera memblokir resolusi yang menyerukan Rusia untuk menarik pasukan dari Ukraina. Duta Besar Amerika mengatakan sangat prihatin dengan perilaku dan sikap Rusia yang selalu menyalahgunakan hak vetonya (Aljazeera, 2022).

Penerapan Strategi Deterrens Rusia Terhadap Ukraina

Rangkaian konflik antar kedua negara terus berlangsung panjang dan berangsur-angsur tidak menemukan titik jelas. Tindakan mengejutkan Vladimir Putin pada Februari 2022 yang melakukan serangan militer terhadap Ukraina dapat dikatakan sebagai upaya *Deterrence* atau pencegahan. Maksud tindakan tersebut disinyalir untuk menghalang bergabungnya Ukraina dibawah pemerintahan Zelensky dengan pihak barat, Uni Eropa dan NATO.

Faktor utama yang menyebabkan invasi militer Rusia disinyalir karena Zelensky dalam pidato pertamanya mengatakan bahwa dunia membutuhkan lembaga dan aliansi baru dan menyerukan negara-negara bertanggung jawab untuk menghentikan konflik. Kehadiran Amerika Serikat yang notabene merupakan penggagas NATO dalam konflik tersebut secara tidak langsung juga memperkeruh situasi konflik di wilayah Ukraina. Possibilitas terkait Ukraina adalah anggota NATO pada akhirnya menjadi ancaman bagi Rusia. (Edward Wong & Lara Jakes, 2022). Kendati demikian, Putin menyatakan bahwa “jaminan dari Pihak Barat yang mengatakan bahwa Ukraina tidak akan bergabung ke NATO tidak cukup memuaskan posisi Rusia”, hal ini sejatinya secara eksplisit memperingatkan Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO maupun Uni Eropa dengan kondisi dan cara apapun (CNN Indonesia, 2022).

Namun tetap harus diingat bahwa NATO sangat terbuka untuk negara Eropa manapun. Dari sisi Ukraina sangat rasional bergabung dengan Uni Eropa untuk alasan perekonomian dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik ditengah krisis yang terjadi. Rakyat Ukraina juga tidak ingin selamanya berada dalam bayang-bayang Rusia. Maka dari itu ditengah kekhawatiran akan militer Rusia yang selalu mengintimidasi Ukraina maka kemudian sangat wajar jika Ukraina mengadopsi strategi kemananan nasional dengan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO dan menghilangkan pengaruh Rusia di Ukraina (Adetunji, 2022).

Jika Ukraina bergabung dengan NATO, hal tersebut dapat memicu perang antara Rusia dengan aliansi. Dalam konferensi pers Putin mengatakan bayangkan saja Ukraina menjadi anggota NATO dan melancarkan serangan militer yang secara otomatis akan menjadi perang yang lebih besar. (Haltiwanger, 2022). Persepsi ini yang menjadikan langkah agresif dengan menganggap bahwa tindakan Ukraina semakin nyata bergabung. Diperlukan upaya dan intervensi militer untuk menghentikan langkah tersebut karena upaya negosiasi dengan Ukraina tidak pernah berwujud untuk mengurungkan niat bergabung. Langkah-langkah Rusia melakukan agresi militer terhadap Ukraina sangat dibenarkan sebagai langkah pencegahan atau *Deterrence* untuk ancaman keamanan yang lebih besar.

Serangkaian upaya dengan invasi militer dan pengeluaran berbagai pernyataan yang ditujukan secara eksplisit untuk Pemerintah Ukraina oleh Rusia memperlihatkan secara jelas bahwa adanya kekhawatiran dari pihak Pemerintah Rusia. Kekhawatiran tersebut berupa eksistensi dan kedudukan NATO yang akan semakin menguat di wilayah sekitar Rusia. Ketakutan ini diproyeksikan oleh Rusia sebagai bentuk ancaman dengan melakukan tindakan pencegahan melalui tindakan/kebijakan militer. Hal ini tentu selaras dengan konsep *deterrence* yang telah diungkapkan di awal penelitian. Upaya dan tindakan Rusia pada akhirnya bermuara pada suatu tujuan yakni mempertahankan eksistensinya terhadap pihak lain yang memberikan ancaman yang dalam hal ini Ukraina berada di pihak NATO dan Uni Eropa. Konsep *deterrence* dalam penelitian ini dapat dikatakan menjelaskan secara komprehensif terkait faktor yang melatarbelakangi tindakan Rusia, kekhawatiran Rusia yang diinterpretasikan secara konseptual dengan konsep *deterrence*

mencerminkan bahwa negara tersebut memiliki *sense of danger* yang merupakan aspek implisit utama dalam konsep *deterrence*.

Kesimpulan

Rusia memandang bahwa negara-negara pecahan bekas Uni Soviet memiliki pengaruh yang signifikan bagi Rusia sehingga menjalin hubungan baik dengan negara-negara tersebut merupakan langkah defensif terhadap aliansi barat, hal ini menunjukkan adanya sikap saling berbalas untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur. Rusia berpandangan bahwa negara-negara yang bergantung pada Rusia termasuk Krimea berperan sebagai wilayah untuk memproyeksikan pengaruh politik dan ekonominya. Dengan menganeksasi Krimea, Rusia menganggap hal tersebut menjadi serangan langsung terhadap Barat termasuk Krimea.

Rusia melakukan intervensi terhadap Ukraina sebagai langkah *deterrence* atau pencegahan pengaruh NATO dan Uni Eropa yang berupaya memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur termasuk Ukraina. Hal tersebut dinilai sebagai ancaman bagi Rusia, karena dengan masuknya Ukraina ke dalam keanggotaan NATO menyebabkan posisi Rusia secara geografis dikelilingi oleh NATO atau bisa disebut dengan *buffer state* NATO. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui tindakan Rusia dalam merespon perluasan keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur dengan menganeksasi wilayah semenanjung Krimea di Ukraina serta invasi militer dan politik terhadap Ukraina. Dan hingga kini, tindakan yang diambil Rusia dalam intervensinya di Ukraina banyak mendapatkan kecaman dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat beserta negara-negara anggota NATO dan masyarakat internasional..

Referensi

- Adetunji, J. (2022, Januari 31). *What's NATO, and why does Ukraine want to join?* Retrieved from theconversation.com: <https://theconversation.com/whats-nato-and-why-does-ukraine-want-to-join-175821>
- Adhi, I. S. (2022, February 26). *Rusia Memveto Resolusi PBB Terkait Penghentian Invasi ke Ukraina, China Abstain.* Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/global/read/2022/02/26/072900570/rusia-memveto-resolusi-pbb-terkait-penghentian-invasi-ke-ukraina-china?page=all>
- Ajeng Chandra Purnamasari, Poppy Sulistyaning Winanti. (2018). *Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Di Bawah Vladimir Putin: Analisis Pilihan Rasional. Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM.*
- Andrew Osborn, Polina Nikolskaya. (2022, February 24). *Russia's Putin authorises military operations in Donbass - domestic media.* Retrieved from web.archive.org: <https://web.archive.org/web/20220224032217/https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-authorises-military-operations-donbass-domestic-media-2022-02-24/>
- Balmforth, R. (2013, Agustus 28). *Ukraine PM tells Russia to accept "reality" of EU trade deal.* Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/article/ukraine-russia-azarov/ukraine-pm-tells-russia-to-accept-reality-of-eu-trade-deal-idUSL6N0GT1GR20130828>
- Barker, L. (2013, Desember 11). *EU talking to IMF, World Bank, others about Ukraine assistance.* Retrieved from reuters.com/: <https://www.reuters.com/article/us-eu-ukraine-idUSBRE9BA0S120131211>

- BBC, O. (2013, November 30). *Ukraine protests after Yanukovich EU deal rejection*. Retrieved from [bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-europe-25162563](https://www.bbc.com/news/world-europe-25162563)
- Brugen, Isabel Van. (2022, Mei 13). *Russia Diplomat Warns Ukraine Joining EU Same as Joining NATO*. Retrieved from [newsweek.com/: https://www.newsweek.com/russia-warns-ukraine-eu-nato-membership-1706302](https://www.newsweek.com/russia-warns-ukraine-eu-nato-membership-1706302)
- Boubaker, S., Goodell, J. W., Pandey, D. K., & Kumari, V. (2022). Heterogeneous impacts of wars on global equity markets: Evidence from the invasion of Ukraine. *Finance Research Letters*, 48, 102934. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322001969>
- BURNS, R. (2022, Februari 2). *EXPLAINER: Ukraine not joining NATO so why does Putin worry?* Retrieved from APnews: <https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-russia-vladimir-putin-soviet-union-4619a72d1597673e4112b673a9f6fd9c>
- CNN Indonesia. 2022. “*Kenapa Rusia Takut Ukraina Gabung ke NATO*” [Online] Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220217114730-134-760380/kenapa-rusia-takut-ukraina-gabung-ke-nato-pada-tanggal-23-november-2022-pukul-00.17-wib>.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Edward Wong & Lara Jakes. (2022, Januari 13). *NATO Won't Let Ukraine Join Soon. Here's Why*. Retrieved from [nytimes.com: https://www.nytimes.com/2022/01/13/us/politics/nato-ukraine.html](https://www.nytimes.com/2022/01/13/us/politics/nato-ukraine.html)
- EEAS, O. (2016, April 28). *Eastern Partnership Panel on CSDP facilitates the participation by partner countries in the EU-led missions and operations*. Retrieved from The Diplomatic Service of the European Union: https://www.eeas.europa.eu/node/8478_en
- Haltiwanger, J. E. (2022, Februari 1). *Putin says if Ukraine ever joins NATO, it may trigger a war between Russia and the alliance*. Retrieved from Insider: <https://www.businessinsider.com/ukraine-joining-nato-could-trigger-war-russia-alliance-putin-says-2022-2>
- Hanappi, Hardy. (2022). *The Background of the Russian Invasion of Ukraine*. VIPER – Vienna Institute for Political Economy Research. MPRA Paper No. 112394, posted 22 Mar 2022 15:30 UTC. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/112394/>. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/112394/1/MPRA_paper_112394.pdf
- Hensman, Rohini. (2022). *The Historical Background to Putin's Invasion of Ukraine*. https://www.researchgate.net/publication/359003040_The_Historical_Background_to_Putin's_Invasion_of_Ukraine. https://www.researchgate.net/profile/Rohini-Hensman/publication/359003040_The_Historical_Background_to_Putin's_Invasion_of_Ukraine/links/6221c6f9a39db062db7e6881/The-Historical-Background-to-Putins-Invasion-of-Ukraine.pdf
- Ida bagus Nindya Wasista Abi, Putu Tuni Cakabawa Landra & Anak Agung Sri Utari. (2015). Intervensi Rusia di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kertha Negara*, 1-7.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF. J. Supranto. 2000.
- Iswara, A. J. (2022, Februari 14). *Apa Itu Perjanjian Minsk dan Fungsinya dalam Konflik Rusia-Ukraina*. Retrieved from [Kompas Global: https://internasional.kompas.com/read/2022/02/14/203700970/apa-itu-perjanjian-minsk-dan-fungsinya-dalam-konflik-rusia-ukraina?page=all](https://internasional.kompas.com/read/2022/02/14/203700970/apa-itu-perjanjian-minsk-dan-fungsinya-dalam-konflik-rusia-ukraina?page=all)

- Jervis, R. (1982). *Deterrence and Perception*. Boston: the President and Fellows of Harvard College and of the Massachusetts Institute of Technology.
- Jervis, R. (1994). *Cooperation Under the Security Dilemma” dalam Richard K. Betts, Conflict After the Cold Arguments on Cause of War and Peace*. New York: Mac Millan Publishing Company.
- Kurkov, A. (2014, November 21). *Ukraine's revolution: Making sense of a year of chaos*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-30131108>
- Leon, D., Jdanov, D. A., Gerry, C. J., Grigoriev, P., McKee, M., Penina, O., & Vagero, D. H. (2022). The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences. *The Lancet Regional Health-Europe*, (15), 1-2. https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/154268. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/The%20Russian%20invasion%20of%20Ukraine%20and%20its%20public%20health.pdf
- Leyen, U. v. (2022, February 22). *vonderleyen*. Retrieved from twitter: https://twitter.com/vonderleyen/status/1495846146824183816?ref_src=twsrc%5Etfw
- Mamfaluthy. (2015). *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, 29-40.
- Mochamad Havis Yanuar & Sasmini. (2015). Legalitas Intervensi Rusia Terhadap Ukraina (Studi Kasus Krimea) . *Belli ac Pacis*, 5-19.
- Morgan, P. M. (1977). *Deterrence: A Conceptual Analysis.. pp. 26–30. ISBN 978-0-8039-0819-2*. North America: SAGE Publications.
- Nag, O. S. (2017, April 25). *What Is The Definition Of A Buffer State?* Retrieved from worldatlas: <http://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-definition-of-a-buffer-state.html>
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- NDTV, O. (2022, Januari 2022). *NATO Puts Forces On Standby As Fears Of Russian Invasion Of Ukraine Rise*. Retrieved from NDTV: <https://www.ndtv.com/world-news/nato-dispatches-ships-jets-amid-russias-military-build-up-for-ukraine-2726690>
- News, B. (2019, April 22). *Ukraine election: Comedian Zelensky wins presidency by landslide*. Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-48007487>
- ORHAN, Ebru. (2022). *THE EFFECTS OF THE RUSSIA - UKRAINE WAR ON GLOBAL TRADE*. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, Vol. 8, Num. 1, 2022, 141-146. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12279>. <http://jital.org/index.php/jital/article/view/277>. <file:///C:/Users/owner/Downloads/277-791-1-PB.pdf>
- Petro, N. N. (2014, Mei 24). *Ukraine's Ongoing Struggle With Its Russian Identity*. Retrieved from worldpoliticsreview.com: <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/13758/ukraine-s-ongoing-struggle-with-its-russian-identity>
- Ramadhan, B. (2014, Februari 25). *Ukraina Minta Bantuan Sebesar 35 Miliar Dolar AS*. Retrieved from republika: <https://www.republika.co.id/berita/n1ixdp/ukraina-minta-bantuan-sebesar-35-miliar-dolar-as>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif . *Jurnal Alhadbarab*, Vol. 17 No 33, 81-95.
- RT, O. (2014, Maret 17). *Crimea declares independence, seeks UN recognition*. Retrieved from russia today: <https://www.rt.com/news/crimea-referendum-results-official-250/>
- Schelling, T. (1966). *The Diplomacy of Violence*. New Haven: Yale University Press.
- Shimshoni, J. (1988). *Israel and Conventional Deterrence*. New York: Cornell University Press.

- Shulman, S. (2004). The Contours of Civic and Ethnic National Identification in Ukraine. *JSTOR*, 35-56.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- tass, O. (2022, Februari 21). *If Ukraine joins NATO, Russia's security threats will increase dramatically — Putin*. Retrieved from RUSSIAN NEWS AGENCY: <https://tass.com/politics/1407343>
- The Associated Press and Reuters. (2022, Februari 28). *Russian President Says West Ignored Security Demands*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/a/putin-says-west-has-not-addressed-key-concerns-in-ukraine-standoff/6417021.html>
- Traynor, I. (2014, Februari 2014). *Ukraine protests: end nears for Viktor Yanukovich despite concessions*. Retrieved from theguardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/21/ukraine-protests-viktor-yanukovich-election>
- Wibiasa, R. (2018). Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia Di Ukraina. *ntermestic: Journal of International Studies*, 60-76.
- Zagare, F. C. (2004). Reconciling Rationality with Deterrence: A Re-examination of the Logical Foundations of Deterrence Theory. *Journal of Theoretical Politics*, 107-141.